BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang didasarkan pada asas desentralisasi atau lebih dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi daerah berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan secara pribadi, peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi ,dan pemerintah daerah kabupaten/kota memperkuat pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya.

Pada era otonomi daerah, prevalensi birokrasi yang kompeten dan profesional bukan sekedar kebutuhan, tetapi merupakan keharusan. Birokrasi yang kompeten dan profesional adalah birokrasi yang memiliki *sense of responsibility dan professionaly* dalam melaksanakan tugas, pokok, fungsi dan kewenangan baik dari segi perencanaan, penganggaran maupun pertanggungjawaban yang berbasis pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Perkembangan pada jaman era globalisasi pada saat ini dalam berbagai aktivitas yang dilakukan banyak ragamnya terutama dalam menghadapi era otonomi daerah. Setiap daerah mempunyai kesiapan yang berbeda- beda, terutama dalam hal pengetahuan dan keterampilan masyarakatnya, yang bisa terlihat dari berbagai macam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya.

Keputusan Gubenur Jawa Barat Nomor 71 tahun 2001 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dalam Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Barat, Gubenur Jawa Barat menimbang bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 16 tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat, maka perlu diatur lebih lanjut tugas pokok , dan rincian tugas Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Barat. Tugas Pokok , fungsi dan rincian tugas Kantor Kas Dearah Propinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksudkan diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Gubenur Jawa Barat.

Laporan keuangan sektor publik yang diatur oleh IPSAS memiliki lima tujuan, yaitu menyediakan informasi – informasi mengenai sumber keuangan, pembiayaan entitas, evaluasi kemampuan pembiayaan entitas, dan evaluasi performance entitas. Tujuan laporan keuangan pemerintah diatur dalam PP 24 Tahun 2005.

Terdapat berbagai macam unsur dalam laporan keuangan, baik laporan keuangan sektor publik maupun laporan keuangan sektor komersil. Menurut PP 24 Tahun 2005, laporan keuangan pemerintah memuat unsur-unsur sebagai berikut : asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan laporan arus kas. Laporan keuangan sektor publik menurut IPSAS terdiri atas : neraca, laporan kinerja keuangan, laporan perubahan asset/ekuitas bersih, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Kantor Kas Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan pemerintah propinsi di bidang pengelolaan kas daerah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 di dalam

Bab II mengenai TUPOKSI Unit kantor Bagian Pertama, Kantor Kas Daerah mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis operasional pekerjaan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang atau surat berharga untuk kepentingan daerah.
2. Penerimaan, penyimpanan, pembayaran atau penyerahan serta pertanggungjawaban uang serta surat berharga milik daerah, selaku Bendaharawan Umum.
3. Mendayagunakan uang daerah dalam bentuk selain giro dengan tetap menjamin tersedianya dana untuk belanja daerah setelah mendapat persetujuan dari gubenur.
4. Penyelenggaraan ketatausahaan kantor.

Kebijakan didalam Kantor Kas Daerah (KKD) Propinsi Jawa Barat yaitu :

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur.
2. Penempatan pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan.
3. Peningkatan kesejahteraan pegawai.
4. Peningkatan sarana dan prasarana Kantor Kas Daerah (KASDA).
5. Identifikasi data penerimaan dan pengeluaran.

Kantor Kas Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan independen penunjang pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Daerah No. 16 Tahun 2000 dalam pasal 3 peraturan daerah dan tanggung jawab langsung kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

Kantor Kas Daerah (KKD) Propinsi Jawa Barat memberikan pelayanan informasi tentang yang berhubungan dengan kas daerah, untuk dapat memberikan pelayanan seperti pencairan SPMU. KKD hanya membatasi pengujian mengenai syarat-syarat tentang hak yang diperoleh yaitu mengenai kebenaran atau keabsahan besarnya jumlah penerimaan dan pengeluaran yang tertera dengan huruf, angka dengan pemisahan berdasarkan kota. Di era otonomi daerah sumber daya keuangan tidak lagi diartikan sebagai "*oto money*" melainkan "*delegation of authory and responsibility*" karena itu pertimbangan utama untuk memberikan otonomi yang lebih besar bukannya terletak pada kemampuan keuangan daerah akan tetapi kemapuan melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab serta mengambil keputusan sendiri di bidang keuangan.

Dengan demikian, daerah dikatakan lebih otonom bukan dilihat dari besar kecilnya keuangan yang dimiliki oleh daerah (pendapatan asli daerah sendiri) melainkan dilihat dari seberapa besar suatu daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab membuat dan mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.

Meskipun demikian, disadari dan dipahami bahwa tanpa dukungan sumber daya keuangan yang cukup, kebijakan otonomi daerah sulit diemplementasikan, apalagi mampu mewujudkan tujuannya. Oleh karena itu peranan biro keuangan dalam menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan visi, misi Jawa Barat yaitu " Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri dan Dinamis Tahun 2013"

Biro keuangan mempunyi peranan penting dalam menetapkan target perolehan pendapatan dalam menunjang pembangunan di Jawa Barat. Unsur dari biro keuangan tersebut yaitu bagian kas daerah yang mengelola pendapatan asli daerah baik penerimaan maupun pengeluaran anggaran, sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya.

Dan salah satu bentuk perwujudan otonomi daerah dan pelimpahan kewenangan dalam suatu proses desentralisasi adalah dengan mengatur dan merealisasi anggaran daerah masing – masing. Tanggung jawab tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah provinsi. Tujuanya tidak lain untuk memberikan kemakmuran sebesar – besarnya bagi daerah itu sendiri. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber – sumber kauangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan didaerahnya.

Pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan tersebut merupakan bentuk perwujudan tanggung jawab pemerintah kepada *stakeholder*.

Anggaran yaitu rencana tentang kegiatan, rencana ini mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Tujuan anggaran di bidang ekonomi adalah untuk mensejahterakan dan menaikkan taraf hidup masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya kegiatan

pembangunan secara sektoral maupun teritorial. Pembangunan sektoral yang mencakup sektor-sektor pertanian, industri, pertambangan, ekonomi, kesehatan rakyat, pendidikan dan pengajaran dan sebagainya. Untuk masing-masing sektor disusun berbagai program dan proyek yang pelaksanaannya karena luasnya masalah, terbatasnya dana maupun keahlian harus dibagi-bagi menjadi program dan proyek yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I/Provinsi, Pemerintah Daerah Tingkat II/Kabupaten dan sebagainya. Dengan demikian untuk satu sektor saja terdapat ratusan program dan proyek yang tersebar diseluruh Indonesia yang pelaksanaannya ditangani dan dikendalikan oleh berbagai pihak pada berbagai tingkat administrasi pemerintahan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan laporan keuangan SKPD serta laporan keuangan BUD. Laporan Keuangan tersebut disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan Keuangan pemerintah daerah juga dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah yang disusun oleh gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemeritah daerah yang dipisahkan. Laporan keuangan pemerintah dearah tersebut harus disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada BPK selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berikutnya.

Gubernur/bupati/walikota memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK serta koreksi lain berdasarkan SAP.

Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit BPK, Pejabat pengelola keuangan daerah menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Raperda tersebut disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada DPRD selambat – lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Raperda yang telah disetujui bersama dengan DPRD, untuk tingkat pemerintah provinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, dan untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur.

Pendapatan merupakan kelompok pertama yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pendapatan dilaporkan sesuai dengan kelompok klasifikasinya. Beberapa hal yang perlu dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah :

1. Kebijakan Akuntansi yang dibuat untuk pendapatan.
2. Klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dan rincian lebih lanjut dari jenis pendapatan.
3. Perbandingan antara realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai perbedaan yang ada.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan merupakan bagian dari Laporan Realisasi Anggaran. laporan realisasi anggaran pendapatan merupakan bagian yang sangat penting bagi pemerintah, karena menyediakan informasi mengenai sumber – sumber pendapatan, alokasi realisasi pendapatan yang diperbandingkan dengan anggarannya.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan merupakan dasar penilaian apakah pemerintah daerah sudah memiliki kemampuan yang kompeten untuk menggali sumber – sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya.

Oleh sebab itu suatu perencanaan secara terpadu dalam bentuk Repelita yang penjabarannya setiap tahun perlu diperinci lagi dalam bentuk RAPBN yang diajukan oleh Presiden dan disahkan oleh DPR RI setiap awal tahun anggaran.

Saya tertarik membahas ini dikarenakan dalam instansi biro keuangan bagian akuntansi dan pelaporan ini lebih dititik beratkan pada anggaran pendapatan dan belanja. Pada tahun 2002 Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertugas menyusun konsep Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang tertuang dalam KMK 308/KMK.012/2002.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan standar tersebut disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tersebut bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan menciptakan transparansi publik.

Salah satu komponen pertanggungjawaban APBD menurut Standar Akuntansi Pemerintahan adalah laporan realisasi anggaran pendapatan. Laporan ini dimaksudkan untuk memberi keterangan tentang pendapatan yang akan direalisasi berdasarkan APBD tahun berjalan. Setiap entitas pemerintahan diwajibkan untuk menyusun anggaran realisasi pendapatan.

Pemerintah provinsi Jawa Barat diwajibkan untuk membuat laporan keuangan secara lengkap sesuai standar yang telah ditentukan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Realisasi anggaran pendapatan dapat menjadi acuan untuk mengetahui sejauh manakah anggaran tersebut dipergunakan, untuk itu maka dilakukanlah perbandingan anggaran dan realisasi belanja. Melihat kondisi penerimaan yang demikian beresiko, maka sangat penting untuk dibuatkan prosedur dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan. Untuk menghindari penyelewengan – penyelewengan pada pelaksanaan realisasi anggaran pendapatan tersebut.

Dalam proses pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran pendapatan tersebut, pegawai instansi khususnya biro keuangan bagian akuntansi dan pelaporan memerlukan kelengkapan data pembelanjaan langsung operasi. Dengan kelengkapan data yang ada, maka pegawai instansi yang sudah bertanggung jawab dalam penyusunan laporan realisasi anggaran akan menjalankan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dengan baik dan lancar.

Dalam melaksanakan Kerja Praktek di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, penulis ditempatkan pada Biro Keuangan bagian Akuntansi dan Pelaporan. Dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, maka penulis tertarik memilih judul dalam laporan kerja praktek yaitu **Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Dalam melaksanakan kerja praktek ini, penulis memiliki maksud dan tujuan yang secara umum adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kerja praktek pada program studi akuntansi dan khususnya akan dijelaskan dibawah ini.

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Adapun maksud yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerja praktek adalah untuk mengetahui proses dan mengumpukan data tentang Prosedur Penyususnan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya pada bagian Akuntansi dan Pelaporan.

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan dari kerja praktek ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyusunan Laporan Realisasi Aggaran (LRA) Pendapatan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari kegiatan kerja praktek ini yaitu :

1. Bagi Penulis
    a. Mampu mengecek surat tanda setoran dari Dinas – dinas Provinsi di Jawa Barat yang di terima oleh Bank Jabar Banten.
    b. Dapat mengecek surat ketetapan retribusi daerah
    c. Dapat mengecek buku rekapitulasi penerimaan harian
    d. Dapat menginput data dari surat tanda setoran ke dalam laporan realisasi anggaran
    e. Dapat menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan khususnya pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Bagi SEKDA Biro Keuangan
    a. Membantu proses pelaksanaan pekerjaan teknis yang berhubungan dengan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
    b. Membantu menginput data ke dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan.
    c. Membantu mengecek Surat Tanda Setoran setiap Dinas di Provinsi Jawa Barat.

d. Membantu mnegecek buku rekapitulasi penerimaan harian

3. Bagi Pihak Universitas Komputer Indonesia

a. Bagi Program Studi Akuntansi

Kerja Praktek yang dilakukan penulis memiliki keterkaitan dangan mata kuliah yang ada pada Program Studi Akuntansi yaitu Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan Pusat.

b. Bagi Fakultas Ekonomi

Sebagai bahan evaluasi untuk kurikulum yang ada pada Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia, materi yang diberikan kepada mahasiswa/i sudah memenuhi syarat dalam kebutuhan dunia kerja. Mata kuliah yang diaplikasikan saat kerja praktek adalah *Microsoft excel*, yang digunakan pada saat mengolah data dan menginput data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan.

1.4 Metode Kerja Praktek

Dalam melaksanakan kerja praktek ini, penulis menggunakan metode *Block Relase,* yaitu suatu metode yang menjelaskan bahwa pelaksanaan kerja praktek tersebut dilakukan dalam 1 (satu) periode tertentu. Kerja Praktek tersebut dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dalam waktu 25 hari kerja yaitu dari hari Senin sampai dengan Jumat. Dimulai dari tanggal 6 Juni sampai dengan 11 Juli 2011. Pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu kerja yang terdapat pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam menyusun laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Lapangan *(Field Research)*

   Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peninjauan secara langsung pada instansi yang dijadikan objek penelitian untuk mendapatkan data. Data ini dapat diperoleh dengan cara :

   a. Pengamatan *(observation)*

      Menurut Kartono (1980: 142) pengertian observasi diberi batasan sebagai berikut: "studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan". Pengamatan dilakukan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Biro Keuangan khususnya pada bagian Akuntansi dan Pelaporan.

   b. Wawancara

      Penulis memberikan pertanyaan secara langsung kepada pihak – pihak yang terkait, seperti kepala bagian akuntansi dan pelaporan beserta para subbagian dan staffnya dalam proses pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran pendapatan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

   c. Dokumentasi

      Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data – data dan mempelajari serta menggunakan formulir – formulir surat tanda setoran (STS), nota kredit, surat ketetapan retribusi daerah dari Bagian Kas dan Daerah.

2. Studi Kepustakaan *(Library Research)*

Yaitu suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai macam bahan bacaan, catatan – catatan pribadi penulis yang pernah dicatat selama mengikuti perkuliahan. Juga bacaan – bacaan yang ada di perpustakaan khususnya buku akuntansi pemerintahan daerah (Abdul Hafiz Tanjung), akuntansi sektor publik (Mulyadi), buku akuntansi keuangan daerah diktat dan bahan – bahan lain yang ditulis dan disusun rapi oleh beberapa penulis yang erat hubungannya dengan masalah laporan realisasi anggaran.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Lokasi merupakan tempat yang dipergunakan penulis dalam melakukan kerja praktek dan waktu kerja praktek adalah diambil sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh program studi akuntansi.

1.5.1 Lokasi Kerja Praktek

Tempat pelaksanaan kerja praktek adalah di Pemerintah Provinsi Jawa Barat Jl. Diponegoro No.22 Telp (022) 4232448 ; 4233347 ; 4230963 Bandung 40115 pada Biro Keuangan Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

1.5.2 Waktu Kerja Praktek

Kerja praktek telah dilakukan penulis dari mulai tanggal 6 Juni sampai dengan 11 Juli 2011. Aktivitas kerja praktek dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Aktivitas Kantor & Waktu Kerja Praktek

HARI	WAKTU	AKTIVITAS
Senin - Jumat	08.00 – 16.00 WIB	Kerja Praktek dan Kantor
Istirahat	12.00 – 13.00 WIB	-
Sabtu & Minggu	-	Libur

Tabel 1.2
Pelaksanaan Kerja Praktek

NO	KEGIATAN	BULAN						
		JUNI 2011	JULI 2011	AGUS 2011	SEPT 2011	OKT 2011	NOV 2011	DES 2011
I	**TAHAP PERSIAPAN KERJA PRAKTEK**							
	1. Permohonan Surat Kerja Praktek							
	2. Pengajuan Kerja Praktek Ke Instansi							
	3. Persetujuan Kerja Praktek							
II	**TAHAP PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK**							
	1. Meminta surat keterangan dari instansi							
	2. Kerja Praktek							
	3. Bimbingan Pembimbing Instansi							
III	**TAHAP PELAPORAN KERJA PRAKTEK**							
	1. Bimbingan Kerja Praktek dengan pembimbing akademik							
	2. Pengolahan Data							
	3. Pembuatan Laporan							
	4. Ujian Kerja Praktek							
	5. Pengumpulan Laporan Kerja Praktek							